

menentukan kriteria ulama yang komprehensif. Dikalangan umat Islam, kata ulama menimbulkan berbagai persepsi sehingga belum ada definisi yang baku.

Dalam upaya merumuskan kata ulama, hendaknya kita merujuk kepada pendapat para mufassir salaf (sahabat dan tabi'in) yang dekat dengan pusat ilmu keislaman. Beberapa diantara pendapat mereka disajikan berikut ini :

- a. Imam Mujahid : "ulama adalah orang yang hanya takut kepada Allah SWT ". Malik bin Anas pun menegaskan, "orang yang tidak takut kepada Allah bukan ulama" .
- b. Hasan Basri : "ulama adalah orang yang takut kepada Allah disebabkan perkara gaib, suka kepada setiap sesuatu yang disukai Allah, dan menolak segala sesuatu yang dimurkai-Nya.
- c. Ali Ash-Shabuni : "ulama adalah orang yang rasa takutnya kepada Allah sangat mendalam disebabkan ma'rifatnya.
- d. Ibnu Katsir : "ulama adalah yang benar-benar ma'rifatnya kepada Allah sehingga mereka takut kepada-Nya. Jika ma'rifatnya sudah sangat dalam maka sempurnalah takutnya kepada Allah.
- e. Sayyid Quthub : "ulama adalah orang yang senantiasa berpikir kritis akan kitab Al Quran (yang mendalam maknanya) sehingga mereka akan ma'rifat secara hakiki kepada Allah. Mereka ma'rifatnya karena memperhatikan

tanda bukti ciptaan-Nya. Mereka yang merasakan ke Maha besaran-Nya. Karena itu mereka khasyyah dan takwa kepada Allah dengan sebesar-besarnya.

- f. Syekh Nawawi al-Bantani : "ulama adalah orang-orang yang menguasai segala hukum syara' untuk menetapkan syahnya agama, baik penetapan syah i'tikad maupun amal syari'at lainnya. Sedangkan Dr. Wahbah az-Suhaili berkata : "Secara naluri, ulama adalah orang-orang yang mampu menganalisa alam fenomena untuk kepentingan hidup dunia dan akhirat serta takut ancaman Allah jika terjerumus kedalam kenistaan. Orang yang maksiat hakikatnya bukan ulama".

K.H. Muh Basri dalam kitabnya Fawaa'idul-Makiyah mengatakan, ulama adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan sanggup mengamalkan ilmunya, mengerti ilmu tafsir, ilmu hadits dan tanggap terhadap masalah yang dihadapi umat pada zamannya. Orang pintar yang tidak mengamalkan ilmunya tidak bisa disebut ulama. (Drs. K.H. Badrudin Hsubky, 1995 : 46)

Sementara itu, dalam musyawarah Antar Pimpinan Pesantren Tinggi (A Ma'habul Ali al-Islami), pimpinan pesantren se-Indonesia merumuskan pengertian ulama sebagai berikut : "Ulama adalah hamba Allah yang khasyyatullah, yaitu mengenal Allah secara hakiki. Mereka

adalah pewaris nabi, pelita umat dengan ilmu dan bimbingannya. Mereka menjadi pemimpin dan panutan yang uswah hasanah dalam ketakwaan dan istiqomah. Sifat ini menjadi landasan beribadah dan beramal shaleh. Tidak mengikuti hawa nafsu, aktif menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mereka tidak mau mengangkat orang-orang yang menjadikan Islam bahan permainan dan senda-gurau sebagai pemimpin. Mereka adalah pemersatu umat, teguh memperjuangkan dan meninggikan Islam, berjuang dijalan Allah, serta melamjutkan perjuangan dalam mencapai keridhaan Allah SWT. (Abdul Qodir Djailani, 1994 : 4)

Dari beberapa uraian maupun ayat-ayat Al-Quran tersebut dapat diketahui bahwa ulama adalah orang yang ahli berpengetahuan tentang agama Islam hamba Allah yang takut kepada-Nya, memiliki wawasan pengetahuan yang luas serta mengamalkan ilmunya.

B. Ciri-ciri Ulama

Sebelum diuraikan tentang ciri-ciri ulama, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasannya ulama ditengah masyarakat dewasa ini dikenal lima macam ulama, yaitu ulama plus, ulama pulus, ulama dunia, ulama akherat, dan ulama dunia akherat. Sosok ulama yang terakhir ini sangat dibutuhkan umat karena ia mampu menuntun

Imam Al Ghozali dalam bukunya Ihya' Ulumuddin menjelaskan; bahwasannya yang dimaksud ulama itu adalah ulama yang memenuhi 12 macam kriteria yaitu:

1. Berbuat sesuai dengan perintah Allah SWT.
2. Pemberian inayah bukan dijadikan perbedaan.
3. Menghindari kemewahan.
4. Menjauhkan diri dari penguasa.
5. Segera tanggap memberikan fatwa.
6. Mengutamakan ilmu bathin.
7. Berkeyakinan kuat.
8. Selalu ingat kematian.
9. Cepat bersedih dan banyak berdiam.
10. Mengutamakan ilmu amal.
12. Menghindari bid'ah. (Drs. Abu Asma Anshori, 1990 :3)

Dengan demikian ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang luas, sanggup mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, tidak terlalu cenderung terhadap kemewahan dunia, sikap gerak bicaranya mencerminkan ketakwaan kepada Allah. Tidak mencari dunia dengan memperlakukannya dan amat memperhatikan umat dengan memperkuat keyakinannya agar memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Jadi seorang ulama sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria :

1. Menguasai ilmu agama Islam (Tafaqquh Fiddin) dan sanggup membimbing umat dalam memberikan bekal ilmu-ilmu kéislaman yang bersumber dari Al-Quran, hadist, ijma', dan qias.
2. Ikhlas melaksanakan ajaran Islam.
3. Mampu menghidupkan sunnah rasul dan mengembangkannya Islam secara kaffah.
4. Berakhlak luhur, berpikir kritis, aktif mendorong masyarakat melakukan perbuatan positif, bertanggung jawab, dan istiqomah.
5. Berjiwa besar, kuat mental dan fisik, tahan uji, hidup sederhana, amanah, beribadah, berjemaah, tawadhu', kasih sayang terhadap sesama, mahabah, serta khasyyah dan tawakal kepada Allah SWT.
6. Mengetahui dan peka terhadap situasi zaman serta mampu menjawab setiap persoalan untuk kepentingan Islam dan umatnya.
7. Berwawasan luas dan menguasai beberapa cabang ilmu demi pengembangannya. Menerima pendapat orang lain yang tidak bertentangan dengan Islam dan bersikap tawadhu'. (Drs. K.H. Badruddin Hsubky, 1995 : 47)

Dari kriteria diatas dapat dipahami bahwa kedudukan ulama di masyarakat, disamping sebagai penjaga nilai-nilai agama atau keagamaan, ulama juga memperli-

suatu untuk menjadikan tetap dan baik, misalnya masalah ekonomi, pembangunan ~~daerah~~ *suatu negara* (W.J.S. Poerwadarminto, 1993 : 963)

Kata nasional yang artinya kebangsaan, yang berkenaan dengan atau berasal dari bangsa sendiri. (W.J.S. Poerwadarminto, 1993 : 672).

Jadi Stabilitas Nasional yaitu : Suatu usaha untuk menjadikan bangsa (warga yang berasal dari bangsa sendiri) tetap baik, mantap, kokoh dari segala yang dapat merusaknya.

Di Indonesia stabilitas nasional dikaitkan dengan ketahanan nasional. Dalam GBHN (Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978) Ketahanan nasional didefinisikan sebagai "Kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara". Jadi ketahanan nasional adalah ketangguhan bangsa dalam mempertahankan diri dalam melangsungkan hidupnya menurut cita - cita dan citranya sendiri. Bisa dikatakan bahwa ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan kedaulatannya. (Franz Magnis-Suseno, 1988 : 83).

Ketahanan nasional begitu pentingnya sehingga MPR memandang perlu untuk mencantumkannya dalam GBHN, dan ditetapkan dalam pola dasar pembangunan nasional sehingga konsepsi ini akan berlaku dan turut mendasari

Ketahanan nasional yang tangguh akan semakin mendorong pembangunan nasional dan sebaliknya berhasilnya pembangunan nasional akan semakin meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional meliputi :

1. Ketahanan dibidang ideologi nasional, yang berakar pada kepribadian bangsa sendiri.
2. Ketahanan dibidang politik, yang mutlak diperlukan untuk membina stabilitas politik dengan mengembangkan kehidupan demokratis yang memadukan kebebasan kreatif dan tanggung jawab.
3. Ketahanan dibidang ekonomi, yang harus diusahakan dengan melaksanakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata.
4. Ketahanan dibidang sosial budaya , dengan mengembangkan rasa senasib sepenanggungan serta keselarasan, keserasian dan keseimbangan sosial
5. Ketahanan dibidang pertahanan dan keamanan, dengan memupuk rasa kesadaran dan tanggung jawab seluruh bangsa atas kedaulatan dan keamanan negara dan bangsa dengan kekuatan angkatan bersenjata sebagai pelopornya. (Prof. Dr. Fuad Hassan, 1988: 414).

Untuk itulah ketahanan nasional ini perlu mendapat perhatian kita yang sebesar-besarnya karena tahun-tahun yang akan datang kita memasuki tahun-tahun yang sulit, berisi beraneka ragam tantangan dan bisa juga merupakan

tidak layak untuk dipatuhinya sebab tidak mampu memenuhi harapannya.

Memang tingkat otoritas atau kredibilitas ulama rata-rata karena adanya sistem "Patrimonial" dan dalam perkembangan dewasa ini, unsur patrimonial saja tidak cukup. tetapi harus ditopang dengan tingkat kemampuannya dalam disiplin ilmu yang ditekuninya, serta karena adanya otoritas moral yang diberikan oleh masyarakat kepadanya . faktor-faktor inilah yang membedakan dan merupakan suatu perbedaan yang menyolok antara ulama dengan pemimpin formal (sipil) di tengah masyarakatnya.

Sehingga tidak mengherankan jika pengaruh dari ulama lebih melebar dan sangat disegani keberadaannya di banding dengan pemimpin formal tersebut. Karena keberadaan tingkat pengaruh, itulah ulama bagi unsur pemerintah adalah merupakan aset yang paling potensial. Suatu kasus yang ada dilapangan ketika ulama memberikan ceramah kepada masyarakat untuk masuk suatu parpol yang diperjuangkan oleh ulama, maka masyarakat yang ada disekitar akan mengikutinya. atau contoh lain ulama memberikan ceramah pada masyarakat pemerintah lewat BKKBN-nya menitipkan pesan agar memberikan pandangan tentang arti pentingnya "Keluarga Berencana" kepada masyarakat. Bahkan tidak hanya disitu saja ulama juga

memberikan arahan tentang cara menciptakan stabilitas nasional, sehingga akan terealisasi suatu keinginan kita bersama, hidup aman dan damai.

Sehingga tampak antara umaro (penguasa) dan ulama harmonis saja hubungannya. Tingkat kerja sama itu berkisar pada ketertiban keamanan dan kesadaran berne-gara. Serta dalam usaha menciptakan stabilitas nasional ulama dijadikan mitra kerja yang efektif dan efisien oleh instansi-instansi terkait yang mempunyai andil dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ., hal ini aparat keamanan sebagai pelaksana program keamanan yang ada di daerah di bawah tanggung jawabnya. Oleh sebab itu antara ulama dengan aparat pemerintah adalah mitra kerja yang harmonis.

Walaupun ulama dalam strata sosial sebagai figur idial dan potensial serta disegani, punya relasi yang kuat dengan pemerintah, ternyata dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat tidak sembarang memutuskan. Hal ini menunjukkan tingkat kebijaksanaan-nya terhadap masyarakat semakin tinggi. Relasi dengan pemerintahannya bukan untuk kemakmuran dirinya, tetapi semua itu demi kemajuan masyarakatnya.

Oleh sebab itu ulama sangat hati-hati dan intro-speksi dan waspada terhadap reputasinya. Sedang seperti yang diuraikan di atas, ulama adalah figur idaman,

Dalam menjalankan tugas para nabi (sekarang : para ulama) yang berat itu, ada dua ketentuan mutlak yang harus mereka laksanakan, yaitu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, dilihat dari sudut agama. Maksudnya mengajak umat untuk melaksanakan kewajiban (khairat) dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik (amal shalih), yang pada waktu ini lebih terkenal dengan sebutan pembangunan.

Disamping itu, para ulama harus melakukan nahi munkar, yaitu mencegah sesuatu kejahatan jangan membiarkan sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Amar ma'ruf dan nahi munkar itu tidak boleh berpisah dan dipisahkan, tidak boleh mengutamakan amar ma'ruf saja dengan mengabaikan nahi munkar. (H.M. Yunan Nasution, 1988 : 61).

H. Munawar Chalil di dalam bukunya "fungsi ulama" mensitir semua pendapat Al-Ghazali. Dengan menambahkan pandangan Syeikh Muhammad Abduh, Sayid Muhammad Rasyied Ridha, dan Al-Amir Syakib Arsalan, lalu disimpulkannya fungsi ulama dalam masyarakat dan negara :

"Dengan mengingat beberapa riwayat yang telah kami kutib di muka, yang menunjukkan bahwa para ulama itu pembawa amanat Allah atas makhluk-Nya, para ulama itu ahli waris atau yang berhak menerima pusaka para nabi, para ulama itu pembawa amanat para rasul, dan ulama itu laksana pelita-pelita yang bertaburan di langit, maka dengan tidak usah direntang-panjangkan lagi, kita umat Islam telah

"Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat thaiyibah (maksudnya : Tauhid, Akidah Islamiyah) laksana sebatang pohon yang baik, yang akarnya kuat dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap muslim dengan seizin Ilahi, Allah SWT, membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat". (Departemen Agama RI, 1974 : 383).

Dalam memberikan uraian tentang perumpamaan itu supaya dapat dihayati, A.Yusuf Ali dalam Tafsir "The Holly Quran" memperinci, bahwa setiap pohon yang besar pada umumnya mengandung empat ciri-ciri khas.

1. Indah. Memberikan kenikmatan bagi setiap orang yang melihatnya.
2. Teguh. Tidak runtuh dan hanyut dipukul badai, sebab uratnya tertancap jauh ke dalam tanah.
3. Melindungi. Dahannya yang tinggi beserta buahnya yang rindang menahan terik matahari, tempat berteduh bagi manusia : ranting-rantingnya tempat bertengger bagi burung-burung dan binatang-binatang lainnya.
4. Berbuah. Pohon itu mempunyai buah-buahan, yang menghasilkan sepanjang masa.

Akidah Islamiyah yang mengandung unsur-unsur tauhid, iman dan yakin menjadi landasan yang kuat bagi setiap muslim/muslimah untuk mengarungi samudera kehidupan yang penuh gelombang ini. Ia tidak bimbang-bimbang, tidak ragu-ragu dalam menghadapi setiap persoalan

dan siapa yang layak memimpin masyarakatnya.

Islam mengajarkan tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu diatur dan dikelola. Oleh sebab itu Islam sarat dengan tuntunan politik. Prinsip halal haram dalam hubungan antar manusia masalah hukum perdata pidana yang dituntunkannya, masalah budaya yang harus dikembangkan manusia, masalah kualitas manusia yang layak dipilih sebagai pemimpin masyarakat/bangsa/negara, masalah perilaku ekonomi yang harus dianut, dan semacamnya membuat Islam tidak bisa terlepas dari dimensi politik kehidupan sosial manusia. Inilah yang membedakan Islam dengan ajaran agama lain yang umumnya hanya memberi tuntunan untuk nilai spiritual, ritual, dan beberapa prinsip pokok moral belaka.

Andaikata Islam juga hanya memberi tuntunan tentang aspek akidah (spiritual), ibadah maghdah (ritual), dan ahklak (prinsip umum moral) saja maka Islam tidak beda dengan agama lain, dan tidak layak terlibat dalam urusan politik. Nyatanya isi Al-Quran 90% sarat dengan masalah sosial, sehingga Islam memang memiliki dimensi politik dalam ajarannya. Umat Islam yang sadar tentu tidak boleh lari dari urusan politik di negerinya. Umat Islam yang sadar tidak boleh di kecoh orang untuk hanya berislam dalam hal berfilsafat dan beritual belaka.

Dalam proses belajarnya tentang ajaran Islam maka umat Islam di Indonesia memiliki banyak keragaman dalam memahami substansi politik dari agamanya. Dalam hal ini dapat dibagi dalam tiga kelompok dasar, yakni :

1. Di satu sisi ada umat Islam yang baru mengenal agamanya dalam aspek spiritual dan ritual belaka sehingga tidak peduli terhadap politik yang sedang berlangsung di negerinya. Mereka malah sering menghindar atau malah menganggap politik sebagai sesuatu yang tabu dan haram untuk dilakukan.
2. Di sisi lain ada umat Islam yang telah menemukan makna pentingnya berpolitik dalam proses kehidupannya, malah mungkin mereka memperoleh makan dari berpolitik namun dia tidak menyadari pesan politik yang diajarkan oleh agamanya. Mereka ini memang ramai-ramai berpolitik namun pada proses berpoliticnya sama sekali tidak mengacu pada ajaran sosial yang diamanatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran yang diakui sebagai kitab suci agamanya. Mereka berpolitik tidak bedanya dengan berpolitiknya orang lain.
3. Terakhir tentu saja ada kelompok umat Islam yang sadar betul akan substansi sosial dari ajaran agamanya yang harus diberlakukan oleh umat Islam melalui proses berpolitik. Mereka ini sadar bahwa dalam masyarakatnya banyak manusia yang mempunyai misi

lain dalam membuat kebijakan sosial (katakanlah politikus yang pro/mendukung diberlakukannya : judi, pelacuran, pakaian seragam buka aurat, riba, perdagangan babi, sterilisasi, kumpul kebo, nudis, anti poligami, presiden non muslim, dst) sehingga dia melihat perjuangan politik memiliki panggilan jihad agar misi politik orang-orang seperti itu tidak berhasil menggoalkan idealisme mereka. Inilah politikus muslim yang sadar untuk apa mereka berpolitik.

Kalau umat Islam mengingat aspek sejarah ini tentu harapan mereka terlimpah kepada PPP untuk bisa membawa misi Islam dalam proses politiknya. Dalam pemilu masih nampak harapan seperti itu, katakanlah misalnya fanatisme berbagai kelompok Islam di pondok pesantren, atau organisasi sosial Islam tertentu yang memberi dukungan terus-menerus pada PPP, terlepas apakah PPP memang transparan menjanjikan misi sosial Islam dalam kampanye mereka atau apakah PPP memang merealisasikan misi sosial Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara efektif atau tidak.

Pengalaman dalam PJPT I menunjukkan bahwa banyak substansi sosial Islam yang berhasil diberlakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak jelas karena hasil karya suatu orpol tertentu. Katakanlah UU Perkaw-

inan, UU Pendidikan, UU Peradilan Agama, hijanya MPR/DRP, hijanya Kabinet, lahinya Bank Mu'amalat, luluhnya SDSB, dan lain-lainnya jelas bukan karya salah satu orpol namun karya para aktifis Islam yang sadar akan misi sosial Islam yang berada dalam semua wadah politik nasional. Tentu saja dalam perubahan-perubahan itu ada pelaku dominan namun jelas pelaku tersebut tidak mungkin bekerja sendirian tanpa dukungan kekuatan politik besar di negeri ini.

Dari uraian di atas menjadi semakin jelas bahwa prospek politik umat Islam Indonesia dalam PJPT II cukup cerah, apalagi jika semua orang Islam yang ikut dalam proses politik praktis, apakah dari jalur ABRI, GOLKAR, PPP, PDI, dan mereka yang berada dalam seluruh jajaran kekuasaan di negeri ini dari tingkat nasional sampai ketinggian lokal seperti desa dan RT benar-benar sadar akan pentingnya untuk memberlakukan misi sosial Islam yang mampu menyelamatkan nasib manusia dari eksploitasi keserakahan dan ketamakan. Prospek itu akan menjadi semakin lebih cerah bila organisasi sosial Islam yang besar seperti NU, Muhammadiyah, PERSIS, Pondok Pesantren, HMI, PMII, dan semacamnya ramai-ramai menganjurkan aktifis Islam mereka yang memahami misi sosial Islam untuk berpacu menempati semua jabatan sosial mulai dari RT sampai ketinggian yang lebih ting-

tori oleh peradaban barat dengan slogan Globalisasi ekonomi itu. Gerakan seperti itu harus dimotori oleh tokoh-tokoh muslim (ulama) yang tidak sekedar berperan sebagai konsultan ritual, namun yang lebih penting tokoh itu harus memiliki kapasitas tinggi dalam bidang IPTEK, manajemen, politik, ekonomi, budaya, dan militer. Karena selama ini umat Islam Indonesia banyak yang mengimamkan tokoh dengan kualitas ritual belaka maka sudah saatnya ditinjau kembali siapa seharusnya yang didukung dan dijadikan pemimpin umat dalam era globalisasi ini. Untuk itu umat harus meninjau kembali sistem kepemimpinan bagi umat. (DR. Fuad Amsyari, 1995 : 236)

Kekokohan seseorang dalam dunia Islam bisa dilihat dari berbagai segi. Satu hal yang sudah jelas sekali dalam masyarakat muslim, bahwa orang hanya bisa disebut layak menjadi tokoh bila ia minimal sudah menunaikan rukun Islam dengan tertib. Dari kelompok orang Islam yang sudah menjalankan tertib rukun Islam itu, maka seorang tokoh Islam selalu dikenal dengan berbagai kelebihan lainnya, seperti keahlian membaca Al Qur'an, keterampilan menghafar kitab suci, mentafsirkan Al Qur'an dan lain sebagainya. Hampir tidak tokoh umat yang walaupun sudah menjalankan rukun Islam secara tertib dan memiliki kapasitas besar dalam bidang IPTEK

kat tersebut dalam interaksi sosialnya. Perubahan itu umumnya juga tidak terjadi secara alamiah, namun karena proses rekayasa sosial yang dimotori oleh beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk membuat orang lain berubah perilaku. Orang yang memiliki kemampuan merekayasa itu pada umumnya orang yang mempunyai kekuasaan politik atau memiliki kemampuan berkomunikasi secara luas dengan masyarakat.

Semua itu berproses dari waktu ke waktu yang bisa mengarah pada yang baik atau mengarah pada yang buruk tergantung rekayasa yang sedang berjalan dalam masyarakat tersebut. Perubahan budaya yang terkait dengan masalah nilai, perilaku, dan karya/produk itu bergerak menurut waktu. Perubahan budaya bisa disebabkan oleh kreatifitas dari masyarakat itu sendiri atau bisa dari intervensi luar yang dimasukkan ke dalam masyarakat. (DR. Fuad Amsyari, 1995 : 179).

Secara ringkas dapat disimpulkan masalah budaya adalah masalah besar yang selalu menjadi pertarungan antara orang Islam yang taat akan ajaran AlQur'an dengan orang lain. Orang lain itu bisa saja atheis atau orang yang beragama lain.

Dari alur pemikiran seperti itu maka kehidupan manusia yang heterogen pasti akan terjadi konflik

peradabannya antara pengikut atheis dan non muslim dengan budaya Islam, walaupun sering tidak tampak terang-terangan oleh berbagai faktor sosial, seperti budaya barat yang telah melanda umat muslim sejauh ini jelas amat terkait dengan proses sekularisasi akidah, apakah dalam bentuk ritualisme agama atau spiritualisme agama. Mereka yang terlarut pada faham ini akan memandang agama hanya sekedar sholatnya saja (atau ditambah beberapa ritual lain seperti doa, puasa dan haji), bahkan banyak yang berislam hanya sekedar menyatakan bertuhan saja di dalam batin dengan tidak memusykannya, amat ikhlass sepenuh hari tanpa amalan-amalan yang lain. Orang Islam seperti inilah jelas telah menyimpang dari ajaran Islam yang utuh. (DR. Fuad Amsyari, 1995 : 194).

Dari rasional seperti itu maka berikut ini diuraikan langkah kongkrit yang harus diambil umat untuk menyelamatkan tatanan kemasyarakatan masyarakatnya :

